



Homo Sapiens at Propheticus

Seri Buku

VOX

ISSN 0216 - 8804

⁵¹
VOX, SERI 52/02/2006

70th LEDALERO SEMINARI TINGGI

- Setelah 70 Tahun Seminari Tinggi Ledalero Berkiprah
(Yohanes Nane)
- Menyoal Keterlibatan Kaum Intelektual
(Amandus Klau)
- Diskursus Profetisme Kaum Intelektual
(Willy Gaut)
- Mengembangkan Paradigma Kecerdasan Intelektual, Emosional dan Spiritual dalam Pendidikan di Perguruan Tinggi dengan Berguru pada Plato
(Dr. Paul Budi Kleden, SUD)
- Standar Mutu Intelektual dan Pendidikan dalam Perspektif Filsafat Persoalan Karl Popper
(Aleksander Dancas)
- Melampaui Tradisionalisme: Eksperimentasi Seorang Cendekiawan Gus Dur dan Identitas Wahidian
(Servinus Nahak)



SERI BUKU VOX

Diterbitkan Berdasarkan SK Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 1304/SK/DITJEN PPG/STT/1986 Tanggal 12 Februari 1986. Dicitak pada Percetakan Arnoldus Ende, Flores – NTT. Terbit Empat kali setahun, ISSN (International Standard Serial Number): 0216-8804.

Diselenggarakan oleh
Para Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero
Kampus Ledalero, Maumere, Flores, NTT

Ketua Pengarah : P. Dr. Philipus Tule, SVD
Moderator : P. Dr. Lukas Djua, SVD
Ketua Penyunting : Kristianto Naben
Wakil Ketua Penyunting : Amandus Klau
Sekretaris : Wily Gaut
Asministrator : Aldi
Anggota : Tomy Limahekin, Hendrikus Pius Bhezo, Yohanes Loin, Erno Beghu, Aloysius Taman, Yon Haryon, Rian Lebaona, Servasius Salvano Jaman, Silvester Ule, Yohanes Nane, Polikarpus K. Kelen

Alamat Redaksi/Tata Usaha:

Seminari Tinggi St. Paulus – Ledalero
Telp. (0382) 21892, Fax (0382) 21893
Maumere 86152, Flores, NTT

Alamat Rekening Bank:

BNI Cabang Maumere
No. 54872934
a.n. Philipus Tule, SVD, qq P. Petrus Bate, SVD

Alamat Redaksi/Tata Usaha:

Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero
Telp./Fax. (0380) 21892 – 21893
Maumere, 86152, Flores NTT

© Penerbit NUSA INDAH
Jln. El Tari, Ende 86318
Flores, NTT, Indonesia

NI: 071616

ISBN: 979 - 429 - 293- 1

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI	4
SUARA DARI BUKIT:	
Setelah 70 Tahun Seminari Tinggi Ledalero Berkiprah	6
<i>Yohanes Nane</i>	
MENYOAL KETERLIBATAN KAUM INTELEKTUAL	15
<i>Amandus Klau</i>	
DISKURSUS PROFETISME KAUM INTELEKTUAL	24
<i>Willy Gaut</i>	
MENGEMBANGKAN PARADIGMA KECERDASAN INTELEKTUAL, EMOSIONAL DAN SPIRITUAL DALAM PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI DENGAN BERGURU PADA PLATO	40
<i>Dr. Paul Budi Kleden, SVD</i>	
MEMBANGUN CITRA DAN JATI DIRI KAUM CENDEKIAWAN YANG BERKEUTAMAAN Satu Telaah Berdasarkan Etika Keutamaan Alasdair MacIntyre	64
<i>Kristianto Nabon</i>	
STANDAR MUTU INTELEKTUAL DAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PERSOALAN KARL POPPER	84
<i>Aleksander Dancar</i>	

PERSOALAN BAHASA DAN KOMUNIKASI DALAM TUGAS PEWARTAAN IMAM	99
<i>Frederikus Tembot</i>	
CENDEKIAWAN HANTU DAN HANTU CENDEKIAWAN Menyoal Peran Kultural Kaum Cendekiawan	115
<i>Luis Aman</i>	
LAKUM DINUKUM WA LIYA DINI: NUANSA DASARIAH BUKU ABDURAHMAN WAHID "ISLAMKU ISLAM ANDA ISLAM KITA" Sebuah Tinjauan Teologis, Sosiologis dan Antropologis	137
<i>Dr. Philipus Tule, SVD</i>	
MELAMPAUI TRADISIONALISME: EKSPERIMENTASI SEORANG CENDIKIAWAN Gus Dur dan Identitas Wahidian	158
<i>Servinus Nahak</i>	
BOX	172

MELAMPAUI TRADISIONALISME: EKSPERIMENTASI SEORANG CENDEKIAWAN Gus Dur dan Identitas Wahidian

——— Servinus Nahak

PENDAHULUAN

Intelektual pada hakikatnya pemali untuk dibungkam. Intelektualitas punya “keanehannya” sendiri, tidak seperti sabun yang menyusut ketika mulai dipakai. Ketakutan untuk menggunakannya adalah dosa yang tidak terampuni. Keyakinan macam inilah yang banyak mempengaruhi para cendekiawan. KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah salah satunya.

Terlahir dari latar belakang priyayi tidak membuatnya *sok* suci. Bahkan perkembangan intelektualnya yang di babak awal sangat kuat dipengaruhi oleh lapisan bawah sadar ortodoksi masif cepat beralih kepada tingkatan lain yang memperlihatkan kesiapannya untuk menerima perubahan. Dengan keberanian dan kesabaran yang tidak dimiliki banyak intelektual, ia mencari pola yang tepat untuk sebuah “tradisionalisme yang tidak ketinggalan zaman” dalam tubuh Nahdatul Ulama (NU).

Nuansa sosio-politik dan religius yang coba dibangun Gus Dur kentara sekali amat lain. Di mata banyak orang ia adalah politisi, agamawan, cendekiawan dan guru bangsa yang cenderung di luar kebiasaan dengan sindiran-sindiran lepas yang menggugat. Bahkan ketika ia sudah menduduki jabatan nomor satu di negeri ini

tabiatnya itu tidak hilang-hilang juga. Anjuran untuk coba menghilangkan kebiasaan ceplas-ceplos itu hanya akan membawa kita berjumpa dengan seorang “Gus Dur asing” – bukan Gus Dur sungguhan. Dengan begitu, Gus Dur tetap tampil beda dan, seperti kata Mohammad Sobary, merupakan “sebuah fenomena kitab kuning”.¹ Ketika berbicara tentang dilema kepemimpinan seorang Gus Dur, Mohammad Sobary mengatakan, “Sampai saat ini saya belum bisa menerima bahwa seorang tokoh intelektual, dan budayawan macam dia, harus berkiprah di dalam kepemimpinan birokrasi. Saya lebih berbahagia melihat Gus Dur sebagai pemimpin umat, atau guru bangsa, dari pada melihatnya di istana.”² Di sini, seorang intelektual rupanya sedang berada di posisi sulit. Ketika birokrasi dicurigai sebagai gudang kasus, maka pilihan untuk masuk dalam area ini tidak lain dari “mau mandi tanpa menjadi basah”.

Kendati bernada subjektif, kecurigaan Sobary cukup beralasan karena Gus Dur ketika itu berada persis di satu wilayah yang telah banyak makan korban. Seorang pemimpin siapa pun dia, selalu berhadapan muka dengan dilema “madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku”. Karena itulah Sobary takut Gus Dur juga akan “telanjur basah”.

Sambil memikirkan anjuran pertama di atas, kita juga tidak boleh menahan diri untuk tidak curiga pada posisi diam yang bisa berarti takut mengambil risiko. Berada di luar sistem pastilah pilihan yang jauh lebih menguntungkan. Ini memungkinkan seorang intelektual dapat lebih leluasa “berteriak” mengkritisi sistem sambil menganjurkan “jalan ketiga” tanpa beban. Pilihan ini juga lebih bebas dari kecurigaan turut “makan uang”. Berkaitan dengan pilihan kedua, yaitu untuk masuk dalam areal birokrasi dalamnya kesahihan seorang intelektual diuji, kita mesti sepakat. Dan, Gus Dur adalah salah seorang intelektual terkemuka yang telah mati-matian membanting tulang untuk bereksperimentasi dalam keadaan seperti ini.

CENDEKIAWAN: BUKAN "INTELEKTUAL TUKANG"

Lapangan bermain seorang intelektual atau cendekiawan sekiranya dapat menghantar kita pada satu upaya pengenalan dan identifikasi yang lebih serius tentang siapa itu cendekiawan. Memang jarang sekali ditemukan uraian yang menjelaskan secara gamblang unsur-unsur dan sifat-sifat mana yang dapat dianggap sebagai ciri khas, bahkan unsur konstitutif dalam diri seorang cendekiawan. Karena posisinya yang demikian, ujian masuk dalam kelas kaum cendekiawan atau intelektual sesungguhnya ada pada legitimasi masyarakat. Atas dasar inilah tidak mungkin seorang dengan serta-merta menyeroboti ruang bermain ini tanpa menunjukkan campur tangannya yang nyata dalam pilihan keberpihakan pada rakyat. Tanpa ini, seorang rupanya tidak layak disebut sebagai cendekiawan. Profil cendekiawan yang sering ditampilkan sebagai pembaru, perumus sasaran baru dan penjabar sikap "tidak setuju" paling tidak melekat pada tiap orang yang berniat masuk atau pada gilirannya digolongkan di sini.³

Dengan cermat, Ron Eyerrman menaruh kontekstualisasi peran cendekiawan di antara dua topik, yaitu konteks politik dan konteks kebudayaan. Menurutnya, batu uji kecendikiaman seseorang atau kelompok orang hanya bisa diukur dalam bingkai budaya, yaitu apakah bisa memberikan sumbangan pencerahan, pencerdasan dan transformasi humanisasi pada masyarakatnya. Artinya, ketika kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan mampu diatasi dengan analisis ilmu sampai pada strukturalisasi politisnya di tangan para pengambil keputusan politis untuk menyejahterakan rakyat banyak, maka di sanalah "cendekiawan transformatif" sah disebut cendekiawan.⁴

Sementara itu, seorang bisa saja gagal mendefinisikan dirinya sebagai cendekiawan dan karena itu lebih layak disebut sebagai "intelektual tukang" ketika kemampuan akademis dan intelektualnya digunakan hanya untuk analisis realitas dan pengembangan ilmu yang tidak perlu mengaitkan komitmen itu dalam bingkai kesejahteraan masyarakat. Jadi, intelektual lebih tampil sebagai profesi murni yang tidak terlalu menghiraukan

sumbangan ilmunya untuk humanisasi masyarakat. Sering ada kecenderungan memanfaatkan keterampilan dan analisis ilmunya hanya untuk para pembelinya atau untuk kepentingan-kepentingan politis yang dapat di-uang-kan.⁵ Dalam pemaparan lebih lanjut, term cendekiawan akan dipertahankan, membedakannya dari “intelektual tukang” yang menurut Mudji sudah membelot.

Dalam sejarah banyak intelektual dinilai gagal karena risiko pencitraan yang demikian menjadikan mereka satu kelas sendiri di tingkat atas. Hal ini secara sosial dan politis memungkinkan lahirnya dua ekstrem yang juga bisa sama kuat, yakni pro rakyat atau pro birokrat. Pada yang pertama, peran itu adalah “panggilannya” sementara pada yang kedua, seorang cendekiawan seharusnya menjalankan fungsi pengawasannya. Hanya, pada yang kedua ada risiko rasionalisasi sikap dalam manifestasi politik kekuasaan. Manifestasi politik seorang cendekiawan mudah mendapat dukungan karena punya sebetulnya “daya paksa” yang memikat.

SPIRIT “WAHIDIAN”: UPAYA MELAMPAUI TRADISIONALISME

Mohammad Sobary masih mau mengatakan sedikit “unek-unek” di hatinya ketika Abdurrahman Wahid menjabat presiden. “Gus Dur jelas berada di lapisan paling elit dalam kepemimpinan sosial di masyarakat kita. Dan sekarang setelah menjadi presiden, bukankah ia membuktikan kebesarannya sebagai pemimpin umat dan pemimpin bangsa? Mungkin. Tetapi saya tidak terlalu setuju dengan penilaian itu. Sejak dulu orang menyebutnya guru bangsa. Maka ketika ia resmi menjadi pemimpin bangsa seperti ini, saya khawatir jangan-jangan – termasuk bila kelak sukses besar sekalipun sebagai presiden – ia malah akan mengalami defisit sosio-politis. Akan tetapi ia sejak dahulu menyukai tantangan. Di dalam politik ia mungkin membuktikan diri sebagai politikus sipil kelas satu, berhadapan dengan – dulu – Pak Harto, sebagai politikus militer yang tak ada duanya.”⁶

Pujian yang secara gamblang diungkapkan Sobary ini, juga banyak pengamat politik lain, secara diam-diam menguatkan aliran psikologis arus bawah (masyarakat) akan aura politik Gus Dur di panggung politik nasional sejak reformasi. Secara elegan Gus Dur bermain bersih sebagai petarung hebat atas nama *wong cilik*. Pendekatannya benar-benar asli dan punya identitas sendiri. Apa yang saya sebut sebagai roh atau spirit Wahidian adalah sebuah “arus Gus Dur” yang (sangat mungkin) tidak dimiliki banyak cendekiawan Indonesia.

Gus Dur unggul bukan pertama-tama karena wawasan kebangsaannya yang luas atau lantaran buah-buah pemikirannya yang brilian saja, tetapi lebih karena pada banyak kesempatan telah menggagas buah-buah pikiran yang melampaui tradisionalisme. Dalam bukunya yang terakhir, **Islamku, Islam Anda, Islam Kita**, Gus Dur menggagas sebuah formula demokratis untuk mengerti “yang tradisional dan modern” secara lebih bijak.

Roh Wahidian sebagai sebuah spirit “melampaui” ada pada Gus Dur. Kata “melampaui” berarti melewati, melebihi, mengatasi. Sebuah kata yang secara literer mengacu pada “kemajuan” sementara kata dasar dari hasil bentukan itu sendiri merujuk pada apa yang kuno, “yang lampau”. Dengan demikian, di sini makna term “melampaui” tidak saja secara konsekuen dibatasi pada tiga arti di atas tetapi perlu dimaknai dalam konteks menghargai “yang lampau” sebagai satu-satunya medium melaluinya “kemajuan” menemukan artinya.

Gus Dur dan Islamnya

Pilihannya untuk melampaui kemapanan pemikiran-pemikiran Islam menjadikan Gus Dur seorang tokoh cendekiawan muslim liberal yang disandingkan bersama Nurcholis Madjid (Cak Nur) dalam deretan cendekiawan Indonesia. Gus Dur tidak pandang bulu, tidak membeda-bedakan agama, etnis, warna kulit, posisi sosial dalam bekerja sama. Dalam menghargai pluralitas, dialah orangnya. Munculnya tuduhan sebagai ketua keto-prak, klenik, neo-PKI, dibabtis masuk Kristen, kafir, murtad,

agen Zionis Yahudi adalah konsekuensi dari banyak pilihan politis dan pandanganya “yang lain”.

Citra kecendekiawanan yang tertanam kuat dalam tokoh nasional kelahiran Jombang, 4 Agustus 1940 ini adalah kemampuan melampaui kemapanan dan melompati jebakan tradisionalisme ekstrem. Tuduhan lebih banyak lagi padanya masih mungkin. Tetapi, Islam sebagai agama adalah hak, termasuk untuk menghayati Islam dengan caranya sendiri sebagai sebuah pengalaman hidup (*syari'at*) tidak dapat dicabut dari diri seorang Gus Dur, juga dari siapa pun yang menghayati Islam.

Islam sebagai jalan hidup (*syari'at*), bagi Gus Dur, terbuka untuk belajar dan saling mengambil berbagai ideologi non-agama, bahkan juga pandangan dari agama-agama lain. Bertolak dari pengembaraan intelektual yang terus mencari idealnya sendiri, Gus Dur akhirnya menyimpulkan bahwa Islam yang dipikirkan dan dialaminya adalah Islam yang khas, yang diistilahkannya dengan “Islamku”. Namun, ini perlu dilihat sebagai serangkaian pengalaman pribadi yang penting untuk diketahui orang lain tetapi tidak mempunyai legitimasi legal untuk dipaksakan.

Sementara yang dimaksudkan dengan “Islam anda” lebih merupakan apresiasi dan refleksi Gus Dur terhadap tradisionalisme dan ritual keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, Gus Dur memberikan apresiasi terhadap tradisi dan kepercayaan sebagai “kebenaran” yang dianut oleh masyarakat tertentu dan harus dihargai. “Kebenaran” semacam ini menganut distingsi yang jelas antara keyakinan dan upaya memaknai pengalaman. Lalu, sintese keduanya, antara “Islamku” dan “Islam anda” pada gilirannya mesti memfermentasikan sebuah konsep “Islam kita”. Ke-kita-an, kendati sulit diwujudkan karena rawan terhadap penyeragaman dengan membenarkan hanya satu pihak, mesti secara ideal tetap menghargai keberagaman.⁷

Sikapnya yang tegas dalam menghayati keislamannya adalah penolakan (upaya melampaui) formalisasi, idealogisasi, dan *syari'at*-isasi Islam. Sebaliknya, kejayaan Islam justru terletak pa-

da kemampuan agama ini untuk berkembang secara kultural. Artinya, upaya memajukan Islam atau agama apa pun mesti memperhatikan aspek “yang lampau”. Latar belakang keterbukaan macam inilah yang kemudian secara jelas dan meyakinkan mempengaruhi pandangan-pandangan politis Gus Dur. Keterbukaan terhadap “yang lampau” lebih kena kalau dimengerti sebagai keterbukaan untuk menerima kebenaran ontologis dari produk-produk historis masa lampau. Itu berarti, “kebenaran historis” adalah kebenaran yang sifatnya hipotesis dan layak diuji setiap saat untuk mendapat tese-tese baru yang juga tidak kekal.

Urgensi “Ijtihad”

Bentuk nyata berpikir bebas diwujudkan dalam *ijtihad*. *Ijtihad* merupakan usaha untuk menyusun konsepsi Islam tentang masalah keagamaan (akidah, ibadah, akhlak dan khilafah), serta usaha untuk menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan dengan mengandalkan kemampuan akal budi untuk menafsir Alquran sambil tetap berpegang pada konsepsi Islam. Menafsirkan ayat-ayat Alquran menekankan pentingnya memahami semangat zaman atau konteks ketika suatu ayat turun (*asbabun nuzul*). Dengan demikian, kita tidak akan memaknai ayat secara harfiah, melainkan didasarkan pada konteksnya di zaman Nabi, dan disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Dalam pemahaman ajaran agama, Muhammadiyah dan NU sama-sama melakukan pembaruan (*tajdid*) dan reformasi (*islah*) pemikiran Islam. Yang berbeda adalah dalam segi metodenya. Muhammadiyah mempunyai preferensi berangkat dari Alquran, hadis, pendapat para sahabat dan para ulama. Sedangkan NU berangkat dari pendapat para ulama, para sahabat, Alquran dan hadis. Upaya pembaruan (*tajdid*) dan reformasi (*islah*) sebenarnya sudah dimulai sejak awal sejarah Islam. Penyimpangan tafsiran terhadap Alquran yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri, misalnya, kemudian mendorong bangkitnya kelompok-kelompok pembaru. Urgensi *tajdid* dan *islah* memungkinkan para *mujaddid* dan *muslibun* melakukan *ijtihad*. Bagi Islam Sunni (kelompok

terbesar di Indonesia), *ijtihad* adalah kunci dalam metodologi *tajdid* dan *islah* tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keunikan dan keaslian Alquran⁸

Jadi, untuk menjawab persoalan umat, yang dibutuhkan bukanlah sekadar re-interpretasi ajaran Islam, melainkan transformasi ide-ide Islam pada zaman yang sedang berjalan. Transformasi melepaskan kita dari kungkungan teks yang statis menuju sumber lain yang lebih dinamis, yakni kondisi sosial. Lebih jauh, membuat tesis, karena nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu berkembang, seharusnya hukum-hukum Islam dan agama mana pun berkembang pula.

Konsep ini mempunyai konsekuensi besar terhadap berbagai hal, misalnya pada perumusan *fikih*. *Fikih* merupakan hasil sekularisasi ajaran Islam di suatu tempat dan waktu. Apa yang dilakukan Nabi adalah *fikih* pada masanya, dan ini bisa jadi berbeda dengan *fikih* yang diterapkan saat ini. Misalnya, Nabi menerapkan bentuk negara teokrasi, itu memang sesuai dengan zamannya. Apakah kita sekarang hendak menerapkan teokrasi, demokrasi, atau bentuk negara lain, sifatnya kondisional. Yang jelas, dalam hal hubungan Islam dan negara, Islam hanya menyediakan nilai-nilai dasar. Kitalah yang menentukan penerapan nilai-nilai itu dalam bentuk apa.

Di masa pemerintahannya, Gus Dur telah ikut melapangkan jalan bagi dakwah liberalisme Islam di Indonesia. Buahnya kini dapat dinikmati kaum liberal dengan adanya berbagai kemudahan menyampaikan pendapat, termasuk mendirikan organisasi. Hanya dalam spirit Wahidian seperti ini, akhirnya orang bisa terbuka untuk memikirkan kemungkinan presiden non muslim yang menurut Gus Dur “mengapa tidak” sambil sama-sama mengatakan “tidak” untuk sebuah aksi bom bunuh diri atau invasi Irak, misalnya.

Tradisionalisme a la Gus Dur

Satu persoalan mendasar yang banyak kali menjebak aliran-aliran fundamentalis adalah kecenderungan dogmatis yang mati-

matian terpaku pada formalisme dan memaksakannya pada pihak lain seolah-olah pandangan yang dianutnya sudah tepat zaman dan memenuhi kriteria “paling baik” untuk dipertahankan. Biar begitu, memposisikan pemikiran-pemikiran aktual-modern sebagai yang serta-merta benar jelas tidak tepat juga.

Dengan demikian, apa yang disepakati sebagai paham modern tidak boleh cepat-cepat digolongkan sebagai yang selaras zaman (*up to date*). Sebaliknya, yang tradisional tidak bisa begitu saja di-daftarhitamkan sebagai yang ketinggalan zaman (*out of date*). Dalam kenyataan, kita berjumpa dengan kesepakatan-kesepakatan aktual yang mengesahkan perang terhadap terorisme. Padahal, secanggih apa pun, perang akan terjebak dalam ekspresi primitif. Karena itu, apapun alasannya, yang tradisional dan yang modern mesti dimengerti secara jeli sambil mendengarkan banyak pertimbangan. Tidak ada paham-paham modern yang sedemikian maju hingga tidak menyisakan lagi spasi untuk menerima konsep-konsep tradisional. Juga, tidak ada paham-paham tradisional yang karena tuanya, menjadi “miskin” dan tidak berdaya menyumbang apa-apa.

Untuk merumuskan yang modern secara tepat sasaran rupanya perlu mengenal apa persisnya hakikat dari yang tradisional. Berhubungan dengan pemikiran modern Islam, Muhammadiyah sejak berdirinya tahun 1912 sudah dikenal sebagai organisasi Islam modern terbesar di dunia. NU yang lahir tahun 1926 sejak awalnya dikategorikan sebagai ormas Islam tradisional. Namun beberapa tahun terakhir ini muncul pendapat-pendapat yang menyatakan, bahwa tampaknya kemodernan NU sudah menyalip Muhammadiyah. Gus Dur sendiri sering digolongkan sebagai motor modernisasi di kalangan NU berkat pergaulannya yang luas dengan tokoh-tokoh pemikir dari dunia Barat dan Timur Tengah.⁹

Jadi, yang tradisional dan yang modern tidak bebas dari jebakan ekstrem yang berat sebelah dan mengandung risiko kalau upaya mewujudkannya tidak melibatkan penilaian yang sungguh, sehingga lahirah aliran-aliran yang disebut “ekstrem kiri” dan “ekstrem kanan”. Sementara, otomatisasi jalan tengah

juga kalau tidak dipertimbangkan matang akan mudah menjadi “ekstrem tengah” yang tidak dapat dipertahankan juga.¹⁰

EKSPERIMENTASI WAHIDIAN: “BUKAN MENGGORENG BUBUR”

Birokratisasi dalam pandangan Gus Dur adalah keadaan yang berciri utama kepentingan para birokrat menjadi ukuran. Sama saja halnya dengan militerisme jika kepentingan pihak militer merupakan ukuran utama bagi perkembangan sebuah negeri. Jadi, bukannya apabila kaum birokrat turut serta dalam kepemimpinan, seperti halnya jika para pemimpin militer ada dalam pemerintahan. Kata kunci dalam kedua hal ini adalah di tangan siapa kekuasaan itu.¹¹ Sebagai contoh, pada tahun 1984 Presiden Soeharto mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Sebagai seorang militer dan karena tidak mau disebut berpihak kepada salah satu dari kedua organisasi Islam di atas, maka Soeharto menekankan pada aspek kelebagaannya saja tanpa menghiraukan aspek budayanya.¹² Dengan tidak disadari akibatnya, maka sikapnya terhadap posisi kementerian atau Departemen Agama lalu menjadi sejarah tersendiri dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara, yaitu semacam persepsi bahwa departemen itu berbidang banyak. Sebuah upaya “departemenisasi” yang secara nasional diiyakan dengan slogan utama “Asal Bapak Senang” (ABS). Baru belakangan ada koreksi atas hal ini, dalam bentuk munculnya keinginan memperkecil ruang gerak departemen tersebut. Namun, birokratisasi di lingkungan Departemen Agama seperti sudah tidak dapat dihambat lagi. Segala hal dicoba untuk “diagamakan” dan sering tanpa mengingat batasan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam bentuk pemisahan agama dari negara, yang terutama dalam bentuk bantuan negara kepada gerakan Islam. Sebagai gantinya muncul penguasaan negara atas agama.

Lalu, sejauh mana kiprah seorang Abdurrahman Wahid ketika menjabat sebagai presiden? Identitasnya sebagai cendekiawan lenyap, kabur atau senada dengan Sobary, apakah

ia benar dicekam bahaya defisit sosio-politis? Dalam banyak hal, karena sikap politisnya yang selalu mengutamakan kebenaran, Gus Dur menjadi seorang pemimpin yang tidak saja bisa buat orang tertawa tetapi terbuka untuk ditertawakan dan dikritisi. Birokrasi adalah tempat seorang cendekiawan bereksperimentasi dan dengan itu menguji kualitas dan kesahihannya. Hanya kelancangan memaksakan satu pertimbangan sebagai yang paling benar tanpa mendengarkan yang lain adalah awal upaya birokratisasi yang perlu dihindari. Cendekiawan tentu akan mencari cara yang paling bijak, tetapi tentu tidak dengan “menggoreng bubur” hanya karena nasi gagal matang.

Karena itu, pula Gus Dur dengan serius mengungkapkan bahwa *assalamu alaikum* bisa saja diganti dengan selamat pagi atau selamat siang yang di mata kelompok Islam skriptural adalah sebuah “kejahatan” intelektual. Sebagai konsekuensinya, ia sering berhadapan dengan golongan-golongan Islam garis keras. Gus Dur bahkan pernah dikritisi habis-habisan lantaran dianggap membonsai Islam atau mereduksi Islam dengan faham sekular, tidak hanya di dalam pemikiran tetapi juga dalam praktik-praktiknya. Tetapi apakah dengan itu citra kecendekiawanannya lenyap?

BAHAYA PENGKULTUSAN

Seorang yang pernah menjabat presiden disebut mantan presiden. Ada mantan camat, mantan kepala desa dan seterusnya. Kata mantan padanannya “bekas”. Berbeda dengan jabatan atau posisi sosial lainnya, peran sosial seorang cendekiawan dalam masyarakat secara praktis sulit menerima bentukan “mantan cendekiawan” dalam artian “bekas cendekiawan”. Dengan demikian, kecendekiawanan adalah citra diri yang dibawa sampai mati dan membekas dalam sejarah.

Dalam kasus ketika seorang cendekiawan dinilai gagal, dengan nada yang keras Julien Benda hanya menyebutnya sebagai “Pengkhianatan Kaum Cendekiawan” tanpa mampu menghapus citra kecendekiawanan itu sendiri dan mendepak

mereka ke satu level di bawah, yaitu “bekas cendekiawan”. Citra baik seorang cendekiawan sudah menyatu sebagai darah dan daging sehingga kemungkinan mengembalikan citra kecendekiawanan pada posisinya akan lebih mudah. Sementara itu, suasana bahasa yang berbeda cepat kita rasakan ketika menyebut “bekas napi”. Citra buruk telah membentuk prasangka yang cenderung mengabaikan setiap pertobatan.

Di sini, tanpa disadari dan jelas tidak diinginkan oleh para cendekiawan, masyarakat sebagai komponen yang kepadanya seorang cendekiawan terpanggil mudah jatuh dalam bahaya pengkultusan. Karena sering berada di pihak rakyat, setiap pendapat dan buah pikiran seorang cendekiawan mudah saja dianggap “tepat” dan punya legitimasi kuat, tidak hanya dibenarkan tetapi untuk dimenangkan. Cendekiawan mungkin tidak mudah jatuh dalam kecenderungan ini. Tetapi bagaimana dengan rakyat? Karena itu, tugas seorang cendekiawan tidak selesai dengan menghasilkan ide-ide pencerahan saja. Seorang cendekiawan mesti melampaui pengkultusan itu sendiri, satu hal yang sangat sulit didefinisikan termasuk untuk menemukan perwujudannya dalam praksis.

PENUTUP

“Semua manusia adalah filsuf”. Dengan proposisi ini, kita lalu yakin, semua manusia adalah intelektual, seseorang karenanya dapat mengatakan bahwa: tetapi tidak semua manusia dalam masyarakat mempunyai fungsi intelektual, menjalankan aktivitas-aktivitas sosial berhubungan dengan perannya sebagai intelektual spesifik.¹³ Gus Dur, karena itu, layak digolongkan pada yang kedua, intelektual spesifik. Dalam konteks seperti inilah roh Wahidian coba dipahami sebagai upaya “tak biasa” seorang Abdurrahman Wahid melampaui kerancuan formalisasi, birokratisasi dan ideologisasi paham-paham yang termaktub dalam Kitab Suci agama-agama besar dunia semisal Alquran atau Alkitab yang dalam banyak abad dianggap pemali terhadap kritik.

Dalam kesadaran bahwa *ijtihad* itu perlu bahkan tak dapat diabaikan, eksperimentasi seorang cendekiawan mesti melibatkan kesadaran penuh bahwa bahkan *ijtihad* tidak lepas dari kemungkinan gagalnya hermeneutika akibat hegemoni politis, misalnya. *Ijtihad* bahkan perlu dinilai kembali ketika sudah ketinggalan zaman.

Karena itu, seorang cendekiawan mesti memiliki dalam dirinya spirit Wahidian untuk tekun bereksperimentasi menguji sebuah hipotesa. Sampai kapan pun, ketika tidur dan terbangun, kita tetap yakin dua tambah dua sama dengan empat. Tetapi soal-soal sosio-politis adalah ibarat bermain dadu. Bahkan ketika secara matematis dapat meyakinkan pilihan, kita tidak pernah bisa lari dari bermain tebak-tebakan. Usaha seorang cendekiawan adalah menemukan penyelesaian, sebuah proses melaluinya kebenaran dapat dicapai. Bukan tebak-tebakan. Dengan ini eksperimentasi berjalan dengan satu pegangan: selalu menghargai masukan lain. Hal ini mengandaikan kejujuran, sebab hanya dengan kejujuran kita akan menemukan diri kita yang sebenarnya. Seorang cendekiawan enggan dan risih bila harus menjadi orang munafik, ia benci pada pikiran-pikiran munafik, yaitu pikiran-pikiran yang tidak berani memikirkan yang timbul dalam pikirannya, atau pikiran-pikiran yang pura-pura tidak tahu akan pikirannya sendiri.

Catatan Akhir

¹Ibarat sebuah Kitab Kuning yang terbuka. Tetapi seterbuka apa pun, kitab kuning tak mudah dimengerti karena kata-kata, atau kalimat-kalimat di dalamnya, tak disertai tanda baca. Pembaca – para santri – harus bergulat menemukan makna sebuah kata tidak dari kata itu sendiri melainkan dari konteks kalimat yang panjang. Orang harus melakukan interpretasi, dengan risiko keliru. Bdk. Ninok Laksono (Ed.), *Indonesia Abad XXI. Di Tengah Kepungan Perubahan Global* (Jakarta: Kompas, 2000), hlm. 612.

²*Ibid.*

³Bdk. Dick Hartoko (ed.), *Golongan Cendekiawan, Mereka yang Berumah di Angin* (Jakarta: Gramedia, 1980), hlm. vii.

⁴Mudji Sutrisno, *Ide-Ide Pencerahan* (Jakarta: Obor, 2004), hlm. 43. Bdk, Syed

Hussein Alatas, *Intelektual Masyarakat Berkembang* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm 13-19.

⁵Atau yang secara serius diungkapkan Julien Benda sebagai “Pengkhianatan Kaum Cendekiawan” (*La Trahison des Clercs*). Esainya tentang Pengkhianatan ini lahir dari peristiwa yang disebut *L’Affaire Dreyfus* pada tahun 1894. Waktu itu, Dreyfus, seorang perwira Prancis berdarah Yahudi diadili berdasarkan tuduhan menjual rahasia militer kepada dinas intel Jerman. Ia dinyatakan bersalah dan dibuang selama sepuluh tahun. Sebagai reaksi atas pengadilan yang tidak adil itu, sejumlah cendekiawan (a.l. Emile Zola) mengumumkan “Manifes para intelektual”. Di lain pihak, sebagian cendekiawan Prancis mendukung gerakan-gerakan totaliter demi ketertiban baru di Eropa. Peristiwa ini mendorong Benda memikirkan hubungan antara kaum cendekiawan dan negara. Uraian selengkapnya baca Julien Benda, *Pengkhianatan Kaum Cendekiawan* (Jakarta: Gramedia, 1999).

⁶Ninok Laksono (Ed.), *Op.Cit.* hlm. 614-615.

⁷Bdk. Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. 67-69.

⁸Bdk. Ibnu Djarir, Kemodernan Muhammadiyah dan NU dalam <http://www.suara merdeka.com/harian/0412/10/opi.htm>. Diakses Selasa, 13 Maret 2007. Baca juga uraian selengkapnya dalam Philipus Tule, *Mengenal dan Mencintai Muslimin dan Muslimat* (Maumere: Ledalero, 2003), hlm. 94-98.

⁹<http://www.gusdur.net/indonesia/index.php> diakses Selasa, 27 Februari 2007.

¹⁰Untuk memahami hal ini kita dapat membandingkannya dengan contoh berikut. Sebuah *handphone* (HP) yang canggih dengan fitur ekstra seperti radio atau foto digital akan kehilangan fungsinya sebagai HP di areal *no signal*. HP, karena itu, menjadi janggal. Bukankah “HP kamera” di area tanpa signal lebih tepat disebut “Kamera yang ber-HP”. Paling tidak fungsinya sebagai HP dibatalkan sementara waktu oleh keadaan (ruang) tanpa signal kendati secara potensial fungsi itu sangat mungkin diaktualisasikan.

¹¹Abdurrahman Wahid, *Birokratisasi Gerakan Islam*, dalam <http://www.gusdur.net/indonesia/index.php>. Diakses Selasa, 27 Februari 2007.

¹²Gus Dur akhirnya punya sikap sendiri. Ia menolak bergabung dengan ICMI lantaran kelewat curiga, lembaga itu sudah kena racun mematikan, yakni birokratisasi.

¹³Antonio Gramsci, *Sejarah dan Budaya* (Surabaya: Pustaka Prometheus, 2000), hlm. 137.



PERPU
LEI
V
5
S
C

